

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Surat Nomor : 125 / KPTS / 1991

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEP. DA. PROP. DIY

NOMOR : 125 / KPTS / 1991

TANGGAL : 1 APRIL 1991

Tentang

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI
SEKOLAH DASAR + SEKOLAH DASAR
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Daerah Daerah Istimewa dan Daerah Tingkat I di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pengukuhkan dan Pengakuan Kewenangan Pemerintah Daerah Istimewa dan Daerah Tingkat I, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Penyelesaian sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lepangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

PERITUGAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar
Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah
sebagaimana
PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Keputusan ini

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman, dan tenram serta dapat memperlancar penyerlanggaran pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhkan Kembalinya Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diulang dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang susunan Organisasi

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1992 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Lampiran:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka sifat ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakelana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepgawainan SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

NEGERI SERAGREJO

KABUPATEN DATI II KULONPROGO

RANTING DINAS P dan K KECAMATAN WATES

SEKOLAH DASAR NEGERI

NO

SEKOLAH DASAR SWASTA

SD NEGERI WATES I	1.	SD BOPKRI WATES I
SD NEGERI WATES II	2.	SD MUHAMMADIYAH MULIHAN
SD NEGERI WATES III	3.	SD MUHAMMADIYAH KEDUNGGONG
SD NEGERI WATES IV	4.	SD MUHAMMADIYAH NGESTIHARJO
SD NEGERI BEJI	5.	SD KANISIUS WATES
SD NEGERI KEDUNGGONG		
SD NEGERI WONOSIDI		
SD NEGERI LAR		
SD NEGERI KARANGSARI		
SD NEGERI GRAULAN		
SD NEGERI KEDUNGPOONG		
SD NEGERI KASATRIAH		
SD NEGERI PEPEM		
SD NEGERI SANGGRAHAN		
SD NEGERI BENDUNGAN I		
SD NEGERI RENDUNGAN II		
SD NEGERI RENDUNGAN III		
SD NEGERI RENDUNGAN IV		
SD NEGERI RENDUNGAN V		
SD NEGERI TAMBAK I		
SD NEGERI TAMBAK II		
SD NEGERI TRIHARJO I		
SD NEGERI TRIHARJO II		
SD NEGERI NGESTIHARJO		
SD NEGERI KULWARU I		
SD NEGERI KULWARU II		
SD NEGERI SOGA' I		
SD NEGERI SOGAN II		
SD NEGERI KARANGWUNI		
SD NEGERI KARANGREJO		
SD NEGERI PUNUKAN		
SD NEGERI GADINGAN		
SD NEGERI TERBAHSARI		
SD NEGERI RENDUNGAN VI		
SD NEGERI SUMBERAN		
SD NEGERI SOGAN III		
SD NEGERI JURANGJERO		
SD NEGERI GIRIFENI		
SD NEGERI KEDUNGDOWO		
SD NEGERI DUKUH		
SD NEGERI DARAT		
SD NEGERI MANGUNAN		
SD NEGERI SERANGREJO		
SD NEGERI KALIKEPEK		